

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan R.A.A. Kusumahsubrata No. 3 Telp (0265) 773709

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS NOMOR: 421.9/44 77 -Disdikbud/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

mbang

- bahwa PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat. Untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat;
- bahwa PKBM menyelenggarakan berbagai keterampilan fungsional yang b. bertitik tolak dari kebermaknaan program bagi warga belajar dengan berorientasi pada perberdayaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dilingkungannya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya,pendidikan dan kesehatan.
- bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas formal sebagaimana C. dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;

moingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan : 1.
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan 2. Perundang Undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan 3. Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 4. Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 5. 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
 - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ; 6.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 7.
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Clamis Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9.
 - Peraturan Bupati Clamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja unsur Organisasi Dinas Pendidikan. 10.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Clamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 11.

erhatikan

- Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal 1. Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012; Permulanan Izin operasional dari Ketua PKBM CITRA Nomor : 421/010-
- PKBM.Cltra/2014 tanggal 10 Norember 2014.

MEMUTUSKAN

Memberi izin Operasional Pusat Keglatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Masyarakat

Nama Ketua

Dusun Wanarasa RT, 04 RW. 01 Desa Kalijaga Kecamatan Danjarsari Kabupaten C'amis

Tgl/Tahun Berdiri

: H. Hadi Supriadi 20 April 2002

Akta Notaris NPWP

Itje Sukaesih, SH, No. 46 tanggal 20 April 2002 21.005.609.9.425.000

Nilem

31.1.05.4.1.0026

EUA

SATU

Izin operasional tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung

s.d tanggal

Desember 2014 my Desember 2019

ETIGA

Hak dan kewajiban lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan unsur-unsur terkait lainnya yang memiliki program kerjasana dengan PKBM

2. Mendapatkan pengakuan tentang penyelenggaraan program yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat dari pemerintah daerah setempat;

3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kewaiiban:

1. Melaksanakan program/kegiatan sekurang kurangnya 3 (tiga) jenis kegiatan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan prinsip PKBM;

2. Mampu menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung

penyelenggaraan program/kegiatan PKBM;

3. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program;

4. Melaksanakan koordinasi dengan Disdikbud dan lintas sektoral terkait;

5. Menyampaikan laporan program/kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (laporan awal, laporan akhir) kepada Disdikbud dan unsur-unsur terkait;

6. Melaksanakan dan menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan Disdikbud Kabupaten Clamis.

7. Mengajukan perpanjangan izin operasional PKBM dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional PKBM berakhir;

REEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: 94 Desember 2014

ALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ATEN CIAMIS.

THE TOTO MARWOTO

Bapak Bupati Clamis

2. Inspektur Kabupaten Clamis

3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banjarsari